



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN TARGET PENYERTIFIKATAN TANAH
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2024**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan penyertifikatan Barang Milik Negara berupa tanah pada Kementerian Perhubungan guna mewujudkan tertib administrasi dan memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, serta menindaklanjuti:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwasanya seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 2. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan Nomor S-281/MK.6/2021 Tanggal 30 Juni 2021 hal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020;
 3. Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-10/KN/KN.2/2024 tanggal 17 Januari 2024 hal Target Program Percepatan Pensertipikatan BMN berupa Tanah TA 2024,
- dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
8. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
9. Kuasa Pengguna Barang (KPB) pada Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Menteri ini.

Untuk :

PERTAMA : Menyelesaikan target penyertifikatan tanah Kementerian Perhubungan Tahun 2024 paling lambat tanggal 30 September 2024.

- KEDUA : Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mendukung penyelesaian program penyertifikatan tanah yang masuk pada target Tahun 2024 dengan:
1. mengalokasikan anggaran dan sumber daya manusia;
 2. melakukan pemantauan dan koordinasi dalam rangka penyertifikatan tanah; dan
 3. melakukan mitigasi risiko dan potensi kendala program penyertifikatan tanah.
- KETIGA : Sekretaris Jenderal melakukan pemantauan progres penyertifikatan dan pemetaan lokasi tanah pada *dashboard* monitoring yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan.
- KEEMPAT : Inspektur Jenderal menyertakan indikator penyelesaian penyertifikatan tanah yang masuk pada target Tahun 2024 dalam pelaksanaan audit kinerja.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- KEENAM : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN TARGET PENYERTIFIKATAN
TANAH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2024

KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PADA SATUAN KERJA ATAU UNIT
PELAKSANA TEKNIS YANG DIINSTRUKSIKAN UNTUK MENYELESAIKAN
TARGET PENSERTIFIKATAN TANAH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2024

NO	KPB PADA SATUAN KERJA ATAU UNIT PELAKSANA TEKNIS	ESELON I
1	Biro Umum	Sekretariat Jenderal
2	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
3	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
4	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Barat	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
5	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
6	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
7	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
8	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
9	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
10	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Tengah	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
11	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Timur	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
12	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tenggara Timur	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
13	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
14	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
15	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
16	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
17	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
18	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (KSOPP) Danau Toba	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
19	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu D.I Yogyakarta	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
20	Kantor Pusat Perhubungan Laut	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
21	Distrik Navigasi Jayapura	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
22	Distrik Navigasi Kelas I Ambon	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
23	Distrik Navigasi Kelas I Bitung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
24	Distrik Navigasi Kelas I Dumai	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

NO	KPB PADA SATUAN KERJA ATAU UNIT PELAKSANA TEKNIS	ESELON I
25	Distrik Navigasi Kelas I Makassar	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
26	Distrik Navigasi Kelas III Merauke	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
27	Distrik Navigasi Samarinda	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
28	Distrik Navigasi Sibolga	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
29	Distrik Navigasi Sorong	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
30	Distrik Navigasi Teluk Bayur	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
31	Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
32	Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Kupang	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
33	Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
34	Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjungpinang	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
35	Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
36	Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Tanjung Emas	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
37	Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
38	Distrik Navigasi Tual	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
39	Distrik Navigasi Benoa	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
40	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Probolinggo	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
41	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
42	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Biak	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
43	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Ende	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
44	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
45	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
46	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
47	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
48	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
49	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
50	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
51	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kotabaru-Batulicin	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
52	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
53	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tarakan	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
54	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
55	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
56	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bagansiapiapi	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

NO	KPB PADA SATUAN KERJA ATAU UNIT PELAKSANA TEKNIS	ESELON I
57	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
58	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Panarukan	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
59	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sukamara	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
60	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Waingapu	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
61	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kumai	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
62	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Laurentius Say Maumere	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
63	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Muara Sabak	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
64	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pangkalan Susu	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
65	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Parepare	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
66	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pekanbaru	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
67	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
68	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjungpandan	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
69	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tg.Pinang	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
70	Kesyahbandaran Utama Belawan	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
71	Pangkalan PLP Tanjung Uban	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
72	Unit Penyelenggara Pelabuhan Wonoreli	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
73	Unit Penyelenggara Pelabuhan Atapupu	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
74	Unit Penyelenggara Pelabuhan Bajoe	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
75	Unit Penyelenggara Pelabuhan Baranusa	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
76	Unit Penyelenggara Pelabuhan Bula	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
77	Unit Penyelenggara Pelabuhan Bulukumba	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
78	Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
79	Unit Penyelenggara Pelabuhan Jailolo	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
80	Unit Penyelenggara Pelabuhan Jampea	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
81	Unit Penyelenggara Pelabuhan Jenepono	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

NO	KPB PADA SATUAN KERJA ATAU UNIT PELAKSANA TEKNIS	ESELON I
82	Unit Penyelenggara Pelabuhan Ka. Mendahara	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
83	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
84	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Banggai	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
85	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuha/Babang	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
86	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
87	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Maccini Baji	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
88	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Palopo	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
89	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raja Ampat	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
90	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Sangatta	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
91	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tahuna	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
92	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
93	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tual	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
94	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bawean	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
95	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kokas	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
96	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kwandang	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
97	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuan Uki	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
98	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leidong	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
99	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lirung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
100	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Majene	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
101	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Paloh	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
102	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
103	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siwa	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
104	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Sarang Elang	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
105	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Telagabiru	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
106	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kintap	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

NO	KPB PADA SATUAN KERJA ATAU UNIT PELAKSANA TEKNIS	ESELON I
107	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Dobo	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
108	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lapuko	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
109	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kolonodale	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
110	Unit Penyelenggara Pelabuhan Korido	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
111	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kotaagung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
112	Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
113	Unit Penyelenggara Pelabuhan Leok	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
114	Unit Penyelenggara Pelabuhan Marapokot	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
115	Unit Penyelenggara Pelabuhan Namlea	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
116	Unit Penyelenggara Pelabuhan Nipah Panjang	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
117	Unit Penyelenggara Pelabuhan Nusa Penida	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
118	Unit Penyelenggara Pelabuhan Ogoamas	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
119	Unit Penyelenggara Pelabuhan Reo	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
120	Unit Penyelenggara Pelabuhan Sarmi	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
121	Unit Penyelenggara Pelabuhan Saumlaki	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
122	Unit Penyelenggara Pelabuhan Seba	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
123	Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Nyamuk	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
124	Unit Penyelenggara Pelabuhan Tana Paser	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
125	Unit Penyelenggara Pelabuhan Tilamuta	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
126	Unit Penyelenggara Pelabuhan Tobelo	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
127	Unit Penyelenggara Pelabuhan Weda	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
128	Kantor Pusat Setditjen Perhubungan Udara	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
129	Otoritas Bandar Udara Wilayah III	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
130	Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli Maba	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
131	Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
132	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bokondini	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
133	Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
134	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dr.Ferdinand Lumbantobing	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
135	Unit Penyelenggara Bandar Udara H. Aroeppala	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
136	Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo Labuan Bajo	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
137	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali - Alor	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
138	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mukomuko	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
139	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
140	Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangaraian	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
141	Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
142	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan M. Kaharuddin Sumbawa Besar	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
143	Unit Penyelenggara Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

NO	KPB PADA SATUAN KERJA ATAU UNIT PELAKSANA TEKNIS	ESELON I
144	Unit Penyelenggara Bandar Udara Torea Fakfak	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
145	Unit Penyelenggara Bandar Udara Wasior	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
146	Unit Penyelenggara Bandar Udara Melonguane	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
147	Unit Penyelenggara Bandar Udara Pogogul Buol	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
148	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
149	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah Ternate	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
150	Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin - Muara Teweh	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
151	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bone	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
152	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bua	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
153	Unit Penyelenggara Bandar Udara H. Asan Sampit	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
154	Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt. Pranoto Samarinda	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
155	Unit Penyelenggara Bandar Udara Nop Goliat Dekai	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
156	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Pembuang	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
157	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Harapan	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
158	Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
159	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin Timika	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
160	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
161	Unit Penyelenggara Bandar Udara Namniwel Namlea Maluku	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
162	Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
163	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda Batlayeri	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
164	Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha Tahuna	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
165	Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele-Takengon	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
166	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perkeretaapian
167	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Direktorat Jenderal Perkeretaapian
168	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Direktorat Jenderal Perkeretaapian
169	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	Direktorat Jenderal Perkeretaapian
170	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Direktorat Jenderal Perkeretaapian
171	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Direktorat Jenderal Perkeretaapian
172	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta Dan Banten	Direktorat Jenderal Perkeretaapian
173	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Direktorat Jenderal Perkeretaapian
174	Satker Pengembangan, Peningkatan Dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	KPB PADA SATUAN KERJA ATAU UNIT PELAKSANA TEKNIS	ESELON I
175	Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	Badan Pengembangan SDM Perhubungan
176	Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)	Badan Pengembangan SDM Perhubungan
177	Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi	Badan Pengembangan SDM Perhubungan
178	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	Badan Pengembangan SDM Perhubungan
179	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO